

## Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air, KSAD Sebut Akan Bertemu Pihak KKB

JAKARTA (IM) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengaku mendengar informasi bahwa Mabes TNI terus melakukan upaya negosiasi dalam pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Salah satu negosiasi itu adalah dengan bertemu pihak TPNBP-OPM. Hal tersebut disampaikan Maruli usai ditanya tentang TPNBP-OPM yang menyebut akan membebaskan Philip setelah satu tahun lebih disandera.

"Jadi yang saya dengar informasinya itu, perlu waktu untuk bertemu. Akhirnya perlu berapa hari lagi untuk menyampaikan, berapa lagi hari ke sana," kata Maruli ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/2).

Maruli menegaskan, Mabes TNI AD memang memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi karena koordinasi tentang upaya pembebasan Philip dipimpin langsung oleh Panglima TNI.

"Jadi kalau kami di Angkatan Darat kami punya keterbatasan untuk mendapatkan seluruh informasi ya. Karena kami tingkatnya adalah pembinaan kekuatan," ujar Maruli.

Meski begitu, Mabes TNI AD terus mengikuti perkembangan yang ada dari Mabes TNI. Ia pun mengaku mendapatkan informasi bahwa pilot Susi Air tersebut dalam keadaan sehat.

"Namun informasi terakhir pilot tersebut dalam masih kondisi sehat, begitu," kata Maruli.

Philip Mark Mehrtens pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru dan sudah hampir satu tahun disandera oleh TPNBP-OPM akhirnya menemukan titik terang.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM) menyatakan siap membebaskan pilot Susi Air itu pada 7 Februari 2024, tepat setahun pilot berpaspor Selandia Baru itu disandera.

"Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat," kata juru bicara TPNBP-OPM, Sebby Sambom, kepada VOA, Sabtu (3/2).

Beberapa waktu lalu beredar pernyataan dari Egianus Kogoya bersama pasukannya yang mengatakan jika pilot Susi Air itu harus ditukar dengan kemerdekaan bangsa Papua. Namun, menurut Sebby, pernyataan yang disampaikan oleh Egianus merupakan emosional sesaat tanpa meminta pendapat dari pimpinan TPNBP-OPM.

"Pilot akan dijadikan jaminan Papua merdeka harga mati, hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena tidak ada sejarah di dunia ini bahwa ada negara yang pernah merdeka karena ditukar dengan tawanan. Jadi hal ini perlu dipahami oleh semua pihak TPNBP termasuk yang di Nduga," kata Sebby. ● me

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## GIBRAN BERTEMU SBY DAN AHY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbincang dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming saat kunjungannya di Puri Cikeas, Kab. Bogor, Jabar, Senin (5/2). Gibran bertemu dan berdiskusi untuk meminta masukan dari SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang tantangan global dan pertumbuhan ekonomi jika dirinya terpilih dalam Pilpres.

## Anies Berubah Jadi Manis terhadap Prabowo, Pengamat: Ingin Pengaruhi Undecided Voters

Pada debat capres yang terakhir, Anies tak lagi mengajukan pertanyaan yang menyindir Prabowo. Hal ini berbeda dengan debat pertama dan ketiga capres.

JAKARTA (IM) - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat terakhir bersikap manis terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2).

Adi melihat Anies tak bersikap kritis kepada Orabowo, seperti yang dilakukannya

pada dua debat sebelumnya. Ia menilai hal inisebagai strategi untuk mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters.

Dengan tidak tampil menyerang, Anies memang tidak terlalu memuaskan pendukung setianya, namun justru bisa mendapat simpati dari mereka yang belum menentukan pilihan.

"Persis, pemilih yang oleng seperti ini disasar Anies. Pemilih oleng ini mesti hati-hati mendekatinya. Anies jadi manis

ke Prabowo," ucap Adi kepada wartawan, Senin (5/2).

Sikap manis Anies ke Prabowo terlihat saat ia kerap menyampaikan kalimat, "Pak Prabowo yang saya hormati." Padahal, kata-kata itu tak nampak pada dua debat capres sebelumnya di mana Anies lebih sering menjawab pertanyaan atau menanggapi statemen Prabowo secara langsung.

Selain itu, Anies juga tak lagi menyampaikan pertanyaan menohok atau pun sindiran ke Prabowo. Sikap itu berbeda dengan debat pertama dan ketiga capres.

Dalam debat sebelumnya, Anies sempat menyinggung soal masalah pelanggaran etika terkait pencalonan Gibran hingga kinerja Prabowo

di kementerian pertahanan.

"Anies tak ingin membangun sentimen negatif dengan tak menyerang secara agresif. Jadinya main manis," ucap Adi.

Menurut Adi, Anies mestinya bersikap kritis seperti sebelumnya. Hal itu dibutuhkan untuk menyampaikan posisi politiknya yang berbeda ketimbang Prabowo maupun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kritik bisa tetap disampaikan tanpa menimbulkan sentimen negatif.

"Debat terakhir mestinya (Anies) gaspol. Jangan takut kelihatan mengkritik dan berbeda, yang penting elegan," paparnya.

Di sisi lain, Adi menganggap semua capres bermain

aman dalam debat kelima itu. Hal itu nampak dari seringnya ketiganya setuju satu sama lain dengan gagasan masing-masing.

"Melihat debat semalam cukup haru. Mirip-mirip majelis taklim, saling puji, dan saling melempar pujian," katanya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar angkat bicara soal performa Anies yang dinilai kurang galak dalam debat capres terakhir. Menurutnya, yang terpenting dalam debat bukan saling sanggah, tapi menyampaikan visi dan misi pada masyarakat.

"Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya," tutur Muhaimin di JCC, Minggu (4/2) malam. ● han

# Sukseskan Pemilu 2024 Dengan Luber-Jurdil

DEMOKRASI adalah tatanan kehidupan bernegara yang menjadi pilihan sebagian besar negara di dunia pada umumnya. Di negara demokrasi, anggota parlemen dan presiden serta kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu di Indonesia. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikedir, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikatif dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dasar hukum pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, dengan membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum.

Tahapan Pemilu terdiri dalam 11 tahapan dengan rincian :

Asas pemilu adalah pedoman umum yang harus dilakukan ketika melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Enam asas pemilu tersebut digunakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang baik. Asas pemilu di Indonesia seringkali disebut sebagai LUBER dan JURDIL. LUBER merupakan jembatan keledai (mnemonik) yang merujuk pada Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Sementara JURDIL merujuk pada asas Jujur dan Adil. Peraturan yang mengatur asas pemilu tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Pada 14 Februari 2024, kita warga bangsa dan negara Indonesia

akan melaksanakan Pemilu yang meliputi Pemilihan Legislatif (Pilleg) DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Kemudian, pada akhir tahun tersebut, kita akan menyelenggarakan Pilkada yang berlaku serentak di 34 Provinsi ditambah 514 kabupaten/kota.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu 2024 diikuti oleh 24 Partai Politik, dengan diantaranya 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ke-

bangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat (PD), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh), Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Nanggroe Aceh, Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh) dan Partai Ummat.

Pada pemilu kali ini, Sebanyak 3,9 juta penduduk Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bogor, melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Bogor bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bogor. Selain menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.889.441, KPU Kabupaten Bogor menetapkan beberapa poin seperti Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 15.228, pemilih baru sebanyak 4.663, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 10.136, perbaikan daftar pemilih berjumlah 93.136 serta pemilih Non KTP-EL sebanyak 45.579.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor bergandengan dengan KPU, BAWASLU serta pemerintah daerah untuk melaksanakan Pemilu Serentak

2024 yang dimulai dengan Kirab Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 15 November 2024. Kirab Pemilu 2024 menjadi sarana integrasi sosialisasi bangsa serta mensosialisasikan partai politik peserta Pemilu 2024 kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan berkompetisi dengan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran, sportivitas, mengedepankan sikap santun dan menghindari unsur SARA.

Selain itu, kegiatan Pendidikan Politik dan Deklarasi Pemilu damai terus digencarkan agar terciptanya pemilu yang berkualitas dan iklim demokrasi yang baik di seluruh elemen masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik. Termasuk, tidak adanya intimidasi, diskriminasi, serta untuk memperoleh informasi alternatif. Kedua, seberapa tinggi tingkat kompetisi (*competitiveness*) kontestasi dimungkinkan.

Bakesbangpol mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor, mari berkomitmen bersama untuk melaksanakan pemilu 2024, gunakan hak pilih anda adalah kedaulatan bagi seluruh elemen masyarakat dalam memilih pemimpin-pemimpin yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif, yang tentunya berdasarkan azas langsung, umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai dan demokratis. ●

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELANGGARAAN PEMILU TAHUN 2024	
JADWAL	TAHAPAN
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2022	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024	masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
diselesaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
diselesaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: PKPU No 3 Tahun 2022

